



DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA: POTRET STUDI LAMPAU

Octandra Basri¹⁾, Tengku Rika Valentina²⁾

Universitas Andalas Padang, Indonesia

2220832012_octandra@student.unand.ac.id¹⁾

tengkurika@soc.unand.ac.id²⁾

Abstrak

Mengetahui dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai sumber datanya. Untuk melakukan kajian ini, berbagai literatur yang ada mengenai dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia dibaca, dikaji, dan dianalisis. Berdasarkan temuan penelitian ini, kehadiran politik perempuan sangatlah penting jika kita ingin meringkaskan proses demokratisasi Indonesia dari sudut pandang demokrasi yang ramah gender. Para aktivis secara terus menerus dan lebih tepat memperjuangkan 30% keterwakilan politik perempuan sebagai perjuangan bersama, berbeda dengan politisi laki-laki yang lebih fokus pada "narasi politik besar". Kita telah melihat gerakan-gerakan signifikan yang dipimpin oleh hampir semua institusi dan komponen gerakan perempuan selama sepuluh tahun terakhir atau lebih, termasuk politisi, jurnalis, akademisi, organisasi kerakyatan, aktivis LSM, dan bahkan orang-orang dan artis terkenal. Bertujuan untuk keterwakilan politik perempuan yang lebih adil, setara dan proporsional.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Kehidupan Politik, Indonesia.

Abstract

Knowing the dynamics of gender equality in Indonesian political life is the purpose of this research. This research is a type of library research that uses books from the library as its data source. To conduct this study, various existing literature on the dynamics of gender equality in Indonesian political life are read, studied and analyzed. Based on the findings of this study, women's political presence is very important if we want to frame Indonesia's democratization process from the perspective of gender-friendly democracy. Activists have continuously and more appropriately fought for 30% women's political representation as a common struggle, in contrast to male politicians who are more focused on the "grand political narrative". We have seen significant movements led by almost all institutions and components of the women's movement over the past ten years or so, including politicians, journalists, academics, popular organizations, NGO activists, and even famous people and artists. Aiming for a more fair, equal and proportional political representation of women.

Keywords: Gender Equality, Political Life, Indonesia

PENDAHULUAN

Suatu keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama pada hak hukum, atau hak yang lainnya disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu hak setiap manusia yang mempunyai suatu peradaban baik dari fisik, ciri-ciri, sikap maupun perbuatan yang mengalami pertumbuhan di lingkungan masyarakat (Mulyani, 2018). Gender memiliki beberapa peran untuk menjadi individu yang produktif, reproduksi, dan sosial, namun pada kenyataannya perempuan



seringkali dipandang lebih lemah dan hanya sekedar saling melengkapi (Utam, 2021);(Handayani, 2017). Selain itu, ada anggapan luas bahwasanya perempuan mempunyai peranan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi perempuan juga dapat mempunyai peran selayaknya laki-laki sehingga tidak adanya perbedaan gender di Indonesia. Diskriminasi gender berujung pada kerentanan perempuan dan potensi kekerasan terhadap perempuan di segala bidang kehidupan (Yunus, 2022);(Rahmi, 2018).

Oleh sebab itu banyaknya kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan perempuan, terutama yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi- pemerintah, terutama dalam bentuk pelatihan mengenai isu gender dan peningkatan kesadaran di kalangan perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengangkat dan memberdayakan perempuan dalam segala aspek, mengatur kehidupan ekonomi, sosial dan politik, Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Jelas sekali bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, maupun masyarakat, dan nyatanya peran mereka diakui oleh masyarakat luas.

Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dan perempuan tergambar berdasarkan struktur sosial budayanya (Dewi, 2023). Tindakan yang tergambar antara laki-laki maupun perempuan dapat terjadi karena adanya kegiatan sosial budaya yang tertanam sejak lahir. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tergambar pada saat anak laki-laki lahir orang tua mendesain kamar dengan desain kamar anak laki sedangkan jika lahir anak perempuan maka orang tua akan mendesain kamar anaknya dengan berbagai desain anak perempuan seperti hello Kitty maupun Barbie (Botifar & Friantary, 2021). Karakteristik sosiokultural selalu dipengaruhi oleh perubahan sejarah, dan gender juga berubah seiring waktu dan tempat. Pada saat yang sama, gender sebagai kodrat Tuhan dan konsekuensi logisnya tetap tidak berubah. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama perbedaan gender tidak berujung pada ketidakadilan seksual, namun yang menjadi permasalahan adalah perbedaan gender menimbulkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki- laki maupun perempuan, dan khususnya bagi perempuan (Zuhri & Amalia, 2022);(Fitria & Aniqurrohmah, 2023).

Ketimpangan gender juga disebabkan oleh sikap- sikap yang berbasis pada pengetahuan sosial yang spesifik gender, sehingga cenderung mengarah pada ketimpangan gender. Budaya sosial dan budaya yang ada menempatkan perempuan pada posisi kelas dua yang didominasi laki- laki (Rokhmansyah, 2016);(Ansyah, 2016). Dalam budaya patriarki dan hegemonik, laki- laki ditempatkan pada posisi kepemimpinan dalam keluarga, organisasi, dan politik, yang berarti partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Minimnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bahkan memimpin organisasi membuat mereka semakin pasif. Fenomena yang masih hangat diperdebatkan di arena publik dan politik adalah isu gender dan kesetaraan gender, dimana kesenjangan masih terlihat jelas. " Gender " mengacu pada sifat dan karakteristik sosial laki- laki dan perempuan. Ciri-ciri dan karakteristik terkait perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya tergambar berdasarkan biologisnya tetapi dapat tergambar berdasarkan sosial budaya (Wandira, 2021). Ketidaksetaraan gender menjadi permasalahan pada masyarakat global abad ke-21 dalam bidang politik maupun publik.

Meski terdapat perjanjian ataupun kesepakatan secara internasional sudah terwakilkan oleh perempuan di parlemen dunia maya 18,4 hanya 7 dari 190 negara yang mempunyai kepemimpinan perempuan. Secara global, kurang dari 7- 8 menteri dan walikota adalah perempuan (Titien, 2014). Laki-laki terus mendominasi arena politik baik di negara maju maupun berkembang, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk partisipasi dalam politik. Tantangan untuk menjamin hak-hak politik perempuan khususnya sangat besar di negara- negara dengan populasi Muslim yang besar, namun seringkali juga terjadi di negara- negara dengan minoritas Muslim. Di negara- negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, dan Republik Islam Iran, partisipasi aktif perempuan dalam politik telah menjadi fenomena penting, dan peraturan serta undang- undang sulit ditegakkan, bahkan di negara- negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat berbeda dengan negara lain. Berdasarkan kajian- kajian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik Indonesia. Dinamika kesetaraan gender pada kehidupan publik Indonesia merupakan dari tujuan pada penelitian yang akan dilaksanakan.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan berjenis penelitian kepustakaan ialah penelitian perpustakaan yang mana data-datanya diambil berdasarkan buku-buku serta dapat melakukan kajian literatur dengan membaca ataupun mempelajari serta menganalisis publikasi terkait dinamika kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

Pada penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teknik pengumpulan data yang mana teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi serta mengumpulkan berbagai data

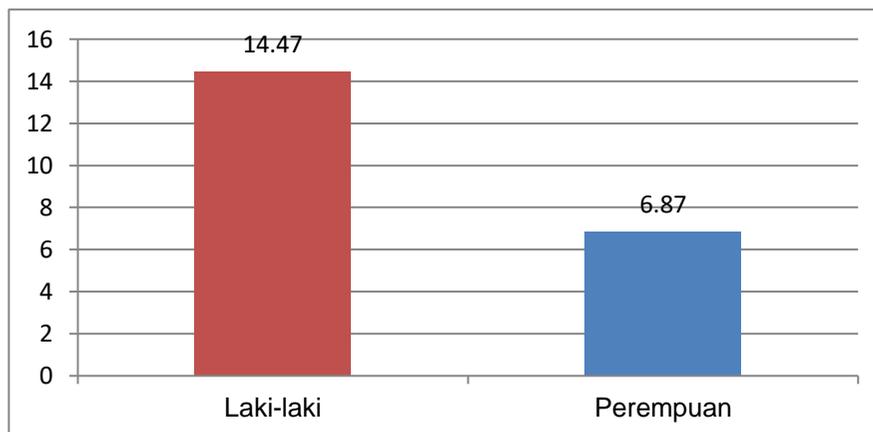
untuk memperkuat suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau library research.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender

Konsep gender mencakup perbedaan antara jenis kelamin yang tidak berakar pada biologi atau dianggap berasal dari kodrat ilahi. Sebaliknya, hal ini merupakan produk dari proses sosiokultural yang lebih luas. Meskipun faktor biologis juga berperan, perbedaan perilaku laki-laki maupun perempuan terutama dibentuk oleh pengaruh sosial dan budaya. Gender berfungsi sebagai alat praktis untuk menilai tantangan yang dihadapi laki-laki dan perempuan, terutama terkait dengan peran sosial yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri (Huda, 2020). Topik gender akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian dan sering diperbincangkan.

Meskipun terdapat kemajuan, kesalahpahaman bahwa kesetaraan gender hanya merupakan urusan perempuan masih tetap ada, sehingga mengarah pada keyakinan yang salah bahwa pencapaian keadilan gender hanya dapat dicapai oleh perempuan, dan tidak termasuk laki-laki. Meskipun perempuan telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengakses sumber daya secara global, keterwakilan mereka di sektor publik, khususnya di bidang politik, masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam peran sektor publik tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun merupakan masalah yang tersebar luas di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju. Misalnya, perempuan masih menghadapi kesenjangan pendidikan dibandingkan laki-laki. Keterbelakangan perempuan ini tercermin dari proporsi perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Partisipasi Perempuan dan Laki-Laki Dalam Pendidikan

Data di atas menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan di sektor publik masih rendah (Budiarta, 2022).

Contoh seterusnya adalah India, dimana perempuan dibagi menjadi tiga kelompok atau kelas: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Persepsi perempuan dalam masyarakat India ditentukan oleh kelas yang mereka ikuti. Hierarki kelas umumnya dianggap berdasarkan warisan atau darah, tanpa memandang kelas ekonomi. Karena perempuan harus memasuki dunia kerja, mereka didorong untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi prestise dan status sosialnya. Di kelas bawah, perempuan harus dilahirkan, tumbuh besar, mendapat pendidikan, tinggal di rumah, bekerja, dan kemudian menikah muda. Hal ini berarti perempuan yang tidak berpendidikan tidak mempunyai insentif untuk mencari pekerjaan yang lebih terhormat.

Education and upholding women's rights are closely related, the lower a woman's education, the less opportunity she has to assert her rights. The main obstacle comes from the family, women are considered only fit to work at home. Therefore, opportunities for them to take part outside the home are very limited (Ainy, 2014). The desire to go to school or obtain other education as a reason to have a career outside the home is rarely approved by the family, especially parents.

Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia

Konsep gender mencakup perbedaan antara jenis kelamin yang tidak berakar pada biologi atau dianggap berasal dari kodrat ilahi. Sebaliknya, hal ini merupakan produk dari proses sosiokultural yang lebih luas (Engineer et al., 2015). Meskipun faktor biologis juga berperan, perbedaan perilaku laki-laki dan



perempuan terutama dibentuk oleh pengaruh sosial dan budaya. Gender berfungsi sebagai alat praktis untuk menilai tantangan yang dihadapi laki-laki dan perempuan, terutama terkait dengan peran sosial yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Topik gender akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian dan sering diperbincangkan. Namun masih terdapat persepsi bahwa gender hanya menyangkut perempuan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender hanya dapat dilakukan oleh perempuan, tanpa keterlibatan laki-laki.

Di seluruh dunia, perempuan menggunakan lebih banyak sumber daya dibandingkan laki-laki. Namun, jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik, khususnya di bidang politik, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju. Misalnya, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal pendidikan. Keterbelakangan perempuan ini tercermin dari proporsi perempuan yang buta huruf (14,47% pada tahun 2001) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (6,87%). Data tersebut menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan di sektor publik masih rendah (Wahyudi, 2018). Contoh berikutnya adalah India, dimana perempuan dibagi menjadi tiga kelompok atau kelas: atas, menengah, dan bawah. Pandangan masyarakat India terhadap perempuan ditentukan oleh kelas di mana mereka berada. Secara umum diyakini bahwa hierarki kelas didasarkan pada warisan atau garis keturunan, tanpa memandang kelas ekonomi. Karena perempuan perlu memasuki dunia kerja, mereka didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula prestise dan status sosialnya. Dalam masyarakat kelas bawah, perempuan harus dilahirkan, dibesarkan, dididik, tinggal di rumah, bekerja, dan menikah muda. Hal ini berarti perempuan yang tidak berpendidikan tidak mempunyai insentif untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Panggung Politik dan Perempuan

Gejolak yang dialami Partai Demokrat selama lima tahun terakhir, terutama menjelang pemilu legislatif tanggal 9 April, setidaknya telah memenuhi medan politik elektoral di Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya perdebatan mengenai keterwakilan politik perempuan. Memang benar, selama lebih dari tiga dekade, kalangan politik nasional telah menaruh perhatian pada keluhan kuat perempuan mengenai struktur budaya dan hubungan sosial-politik pasca reformasi, yang masih bersifat gender dan terpinggirkan serta mengatur wanita. Persidangan terhadap perempuan ini sejalan dengan semakin berkembangnya isu keadilan dan kesetaraan gender, yang semakin banyak muncul dalam perdebatan sosial-politik dan politik nasional. Meski saat ini negara ini relatif toleran dan menuntut keterwakilan politik perempuan, namun negara memahami bahwa ruang negara bagi ekspresi politik perempuan masih jauh dari semangat keadilan. Persamaan Meskipun penetapan kuota 30 orang di seluruh negara bagian telah dicoba sejak tahun 2004, namun jika melihat sejarah pertumbuhan keterwakilan perempuan di parlemen, kuota tersebut masih berbeda. Data mengenai keterwakilan politik perempuan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Misalnya, antara tahun 1950 dan 1955, anggota DPR Sementara mampu memenangkan 9 dari 236 kursi yang dipilih (3,8%). Antara pemilu tahun 1955 dan 1960, proporsi perempuan meningkat menjadi 17 dari 272 kursi (6,3%). Keterwakilan perempuan di parlemen juga bervariasi. Pada masa Majelis Konstituante (1956-1959), jumlah anggota perempuan berkurang menjadi 25 (5,1%) dari 488 kursi Majelis Konstituante. Keterwakilan politik perempuan di Kongres juga mengalami pasang surut pada masa Orde Baru. Pada pemilu pertama pemerintahan baru (1971-1977), perempuan memenangkan 36 dari 460 kursi (7,8%), pada pemilu 1977 perempuan memenangkan 29 dari 460 kursi (6,3%), dan pada pemilu 1982 perempuan memenangkan 36 kursi dari 460 kursi (6,3%) memenangkan 39 kursi (8,5%). Terpilih untuk tiga periode sebagai anggota Republik Demokratik Rakyat Korea. Selanjutnya pada pemilu 1987, perempuan mampu meraih 65 dari 500 kursi DPR (13%). Pada tahun 1992–1997, 1997–1999, dan 1999–2004, proporsi ini terus menurun hingga mencapai 62 kursi (12,5%). 54 kursi (10,8%), dari 500 kursi setiap anggota DPR memperoleh 46 kursi (9%) pada setiap periode pemilu. Pada pemilu tahun 2004, jumlah anggota parlemen perempuan kembali meningkat menjadi 63 (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan pada pemilu tahun 2009, terdapat 99 perempuan dari 560 calon anggota DPR (17,68%). Akibat pemilu tahun 2009, jumlah kursi perempuan pada pemilu tahun 2014 mengalami penurunan meskipun terdapat berbagai inisiatif seperti tindakan afirmatif dan kebijakan lainnya.

Keterwakilan politik perempuan merupakan elemen penting jika kita ingin menempatkan perspektif demokrasi yang sensitif gender dalam konteks demokratisasi di Indonesia (Indra, 2018). Berbeda dengan politisi laki-laki yang tertarik pada “cerita politik besar”, aktivis perempuan justru berjuang lebih intensif dan konsisten sebagai bagian dari program perjuangan bersama untuk 30 persen keterwakilan politik perempuan. Setidaknya selama satu dekade terakhir, kita telah melihat hampir seluruh aktivitas politik kita di hampir semua kelompok dan elemen yang terlibat dalam perjuangan perempuan, termasuk politisi,



aktivis LSM, organisasi akar rumput, akademisi, jurnalis, bahkan artis dan selebriti gerakan menuju kanalisasi Energy of a Cause: bertujuan untuk keterwakilan politik perempuan yang lebih proporsional, adil dan setara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan dimulainya era pembebasan politik akibat reformasi politik tahun 1998, perdebatan mengenai keterwakilan politik perempuan menjadi semakin penting. Sebab di era Orde Baru, perdebatan mengenai keterwakilan politik perempuan merupakan bagian dari sejarah demokratisasi dan realisasi hak asasi manusia dan sipil, dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan, tidak mendapat tempat. Dengan runtuhnya narasi besar kerjasama pembangunan, program pembangunan yang pragmatis dan represif berdasarkan ideologi yang secara ketat mengontrol pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, perdebatan mengenai keterwakilan politik perempuan dalam konteks demokratisasi hampir hilang. Hal ini sangat didukung oleh negara-negara demokratis. pemerintahan Soeharto saat itu jika mencermati catatan sejarah perjalanan politik perempuan di negeri ini, terlihat bahwa nilai-nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia pada tahun-tahun awal revolusi, menurut saya, secara kualitatif lebih bersifat material dan membumi dibandingkan artifisial terekam dalam wacana politik kontemporer Indonesia. Seiring berjalannya waktu, peran, status dan pengakuan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik semakin berkurang. Di era demokrasi terkelola, peran sosio-politik perempuan sebagian besar terfragmentasi dan dapat diperebutkan karena dinamika politik negara pada saat itu. Meskipun perempuan memiliki posisi politik yang relatif kuat saat ini, namun dalam praktiknya mereka masih berada di urutan kedua dan sering digunakan sebagai instrumen kebijakan negara. Rezim Suharto pada masa Orde Baru mempunyai kemauan politik untuk mendirikan sebuah kementerian yang khusus menangani isu-isu perempuan, namun arah politik negara korporat dipengaruhi oleh model politik patron-klien dan budaya hegemonik "politik laki-laki" masih ada. Struktur budaya politik pemerintahan ini. Perempuan dapat memainkan peran sosiopolitik di bawah kendali negara yang ketat, namun hanya dalam kerangka kewajiban normatif.

Ketika era reformasi dimulai, para menteri negara yang bertanggung jawab meningkatkan pengaruh perempuan terus menekankan kesetaraan gender sebagai isu utama. Namun, upaya para pendeta, aktivis, dan berbagai organisasi perempuan untuk mencapai kesetaraan terus terhambat oleh budaya patriarki dan praktik politik yang menolak partisipasi. Dalam struktur sosial yang patriarki, salah satu alasan utamanya adalah struktur sosial dan budaya perempuan seringkali dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Legitimasi atau kontrol menggambarkan suatu perbuatan atau tindakan individu yang mengkomodifikasi seksualitas perempuan (Dzuhayatin, 2015). Sarana keinginan seksual pria pada struktur kekuasaan patriarki, politis tidak hanya menggambarkan kepentingan suatu kekuasaan maupun gender. Adanya pengungkapan terkait perbuatan mesum antar politis DPR dengan artis dangdut pada kurun waktu lalu menggambarkan teori kombinasi kekuasaan uang maupun seks itu benar adanya. Kekuasaan politik menjadikan aktor dangkal (politik adalah kekuatan kekuasaan) namun juga korup (tidak hanya haus uang dan kekuasaan, namun juga penuh keserakahan). Pesan penting yang dapat dipetik dari temuan kasus-kasus menyimpang politisi DPR di atas adalah bahwa merosotnya moralitas politik di tingkat elite tidak hanya ditandai oleh banalitas politik, namun juga oleh dualitas fitrah manusia. Sifat manusia semakin diakui. Alam seperti yang ditunjukkan oleh homos Saat berhubungan seks, Meski begitu, omongan kotor DPR memperkuat argumentasi bahwa status perempuan di tanah air masih kuat dalam cengkeraman budaya politik patriarki.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka kesimpulan penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang perempuan, yang merupakan sumber daya yang sangat besar melebihi jumlah penduduk di seluruh dunia. Namun, keikutsertaan kaum perempuan pada sektor publik khususnya pada sektor politik jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rendahnya keikutsertaan perempuan pada politik tidak hanya di Indonesia saja tetapi sudah terjadi di berbagai dunia termasuk negara-negara maju seperti perempuan masih rendah kepemimpinannya dibanding laki-laki dalam hal pendidikan. Keterbelakangan perempuan ini tercermin dari tingginya angka buta huruf pada perempuan (14,47% pada tahun 2001) dibandingkan laki-laki (6,87%). Data ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan di sektor publik masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Ainy, D. N. (2014). PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENEGAKKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI DPRD MALUKU TENGAH. In *Prosiding SNPRPT* (Vol. 1, p. 2014).



- Ansyah. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal k ritik sastra feminisme. *Jurnal Politik*, 3(1).
- Botifar, M., & Friantary, H. (2021). Refleksi Ketidakadilan Gender dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban : Perspektif Gender dan Feminisme. *Sastra*, 3(3).
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa : Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23–33.
- Dewi, C. (2023). PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL BUDAYA ORANG KAILI DI SULAWESI TENGAH. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 11(3), 352–368.
- Dzuhayatin. (2015). Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Ek sistens i. In *Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*.
- Engineer, A. A., Fakhri, M., Arbain, J., & Azizah, N. (2015). PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin ,. *SAWWA*, 11, 75–94.
- Fitria, S., & Aniqurrohmah, L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusi. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Kesetaraan Gender*, 1(1), 50–56.
- Handayani. (2017). Konsep dan teknik penelitian gender. In *UMMPress*.
- Huda. (2020). Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya. In *CV Cendekia Press*.
- Indra. (2018). PENGARUH KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI LEGISLATIF KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERHADAP KEBIJAKAN SENSITIF GENDER. In *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(2), 92–103.
- Mulyani, T. (2018). Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(1), 149–158.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *MERCATORIA*, 11(1), 37–60.
- Rokhmansyah. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal k ritik sastra feminisme . *Garudhawaca.*, 2(1), 2016.
- Titien. (2014). Perjalanan Perempuan Indonesia " Mengejar " Kouta Kursi Parlemen. *Mu'Adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
- Utam, C. W. (2021). Kerawanan banjir rob dan peran gender dalam adaptasi di kecamatan pekalongan utara. *Jurnal Planologi*, 18(1), 94–113.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Wandira, A. (2021). Women's Image in Ibu Mendulang Anak Berlari Poetry Collection by Cynthia Hariadi). *Badanbahasa.Kemdikbud*, 17(1), 30–44.
- Yunus. (2022). Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial. In *Humanities Genius*.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). KETIDAKADILAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI DI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 05(01), 17–41.